RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR
Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara –Sempor
Telepon (0287) 471055
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Kecamatan Sempor dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 ini yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan (2023).

Rencana Kerja ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharap saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk perbaikan sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsp akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik *(good governance).*

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 ini.

Kebumen, 10 September 2021

CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. DRAJAT TRIWIBOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650531 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	4
	C. Maksud dan Tujuan	4
	D. Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	5
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sampai Tahun 2020	5
	B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor	16
	C. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	22
	D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.	29
	E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..	31
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	32
	A. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen	33
	B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
	C. Program dan Kegiatan	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMPOR.	40
BAB V	PENUTUP	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Sempor yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya Kecamatan Sempor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022. Tatacara penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 juga mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun kedua dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : "*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*". Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sempor adalah Misi ke-1 (satu) yaitu: "*Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi*".

Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 dengan Dokumen

Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen periode tahun 2022 :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
23. Keputusan Camat Sempor Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sempor Tahun 2022 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sempor tahun sebelumnya (2020).

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sempor disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra
- B. Analisis Kinerja Pelayanan
- C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Reviev Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sempor
- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- B. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sempor

Bab V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SEMPOR TAHUN 2020

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Sampai Tahun 2020

Renja Kecamatan Sempor disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Sempor saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih yaitu: Capaian Peningkatan Pelayanan PATEN dan Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.

Bahwa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Sempor meliputi :

1. Pembuatan KTP
2. Pembuatan KK
3. Penerbitan Surat Pindah WNI antar Kecamatan
4. Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi
5. Penerbitan Akta Kelahiran
6. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar
7. Pembuatan Akte Kematian
8. Penerbitan IUMK
9. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian
10. Pemberian Rekomendasi BBM
11. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
12. Legalisasi SKCK
13. Pemberian Legalisasi KKN, Survey dan Penelitian
14. Pemberian Legalisasi Proposal
15. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
16. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke Luar Daerah

Renja Kecamatan Sempor Tahun lalu, yaitu tahun 2020 harus dievaluasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Kecamatan Sempor tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2021 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan 2021. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Sempor melaksanakan 13 (Tiga belas) program dengan 31 (Tiga puluh satu) kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.179.053.000,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 100% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 94,93 % atau Rp. 2.068.495.556,00. Program dan kegiatan Kecamatan Sempor tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran
    1) Kegiatan Penyediaaan Jasa Surat Menyurat; jumlah anggaran : Rp 1.601.000,00; realisasi anggaran : Rp 1.596.000,00; kinerja anggaran : 99,69 %; rencana output : tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan; realisasi output : tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan kinerja output : 100 %
    2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; jumlah anggaran : Rp 30.645.000,00 realisasi anggaran : Rp. 19.330.624,00; kinerja anggaran : 63,08 %; rencana output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan; realisasi output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan; kinerja output : 100 %;
    3) Kegiatan Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; jumlah anggaran : Rp 35.000.000,00 realisasi anggaran Rp 25.373.826; kinerja anggaran : 89,77 %; rencana output : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit (roda empat 1 unit, roda dua 8 unit), 12 bulan; realisasi output : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit (roda empat 1 unit, roda dua 8 unit), 12 bulan; kinerja output : 100 %
    4) Kegiatan Penyediaaan Jasa Administrasi Keuangan; jumlah anggaran : Rp 16.015.000,00 realisasi anggaran Rp 15.620.000,00; kinerja anggaran : 97,53%; rencana output : tersedianya jasa administrasi keuangan, 12 bulan; realisasi output : tersedianya jasa administrasi keuangan, 12 bulan; kinerja output : 100 %
    5) Kegiatan Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor; jumlah

anggaran : Rp 30.550.000,00 realisasi anggaran Rp 30.548.400,00; kinerja anggaran : 99,99 %; rencana output : tersedianya sarana kebersihan kantor, 12 bulan; realisasi output : tersedianya sarana kebersihan kantor, 12 bulan; kinerja output : 100 %

6) Kegiatan Penyediaaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; jumlah anggaran : Rp 5.230.000,00 realisasi anggaran Rp 5.230.000,00; kinerja anggaran : 5.230.000 %; rencana output : tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, 12 bulan; realisasi output : tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, 12 bulan; kinerja output : 100 %
7) Kegiatan Penyediaaan Alat Tulis Kantor; jumlah anggaran : Rp 5.896.000,00 realisasi anggaran Rp 5.896.000,00; kinerja anggaran : 100 %; rencana output : tersedianya alat tulis kantor, 12 bulan; realisasi output : tersedianya alat tulis kantor, 12 bulan; kinerja output : 100 %
8) Kegiatan Penyediaaan Barang Cetak dan Penggandaan; jumlah anggaran : Rp 3.700.000,00 realisasi anggaran Rp 3.699.900,00; kinerja anggaran : 99,99 %; rencana output : tersedianya barang cetak dan penggandaan, 12 bulan; realisasi output : tersedianya barang cetak dan penggandaan, 12 bulan; kinerja output : 100 %
9) Kegiatan Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; jumlah anggaran : Rp 2.500.000,00 realisasi anggaran Rp 2.498.200,00; kinerja anggaran : 99,93 %; rencana output : tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 12 bulan ; realisasi output tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 12 bulan; kinerja output : 100 %
10) Kegiatan Penyediaaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan; jumlah anggaran : Rp 2.000.000,00 realisasi anggaran Rp 1.320.000,00; kinerja anggaran : 66,00 %; rencana output : tersedianya bahan bacaan dan surat kabar, 12 bulan ; realisasi output : tersedianya bahan bacaan dan surat kabar, 12 bulan; kinerja output : 100 %
11) Kegiatan Penyediaaan makanan dan minuman; jumlah anggaran : Rp 38.880.000,00 realisasi anggaran Rp 38.880.000,00; kinerja anggaran : 38.880.000 %; rencana output : tersedianya makanan dan minuman rapat, 12 bulan ; realisasi output : tersedianya makanan dan minuman rapat, 12 bulan; kinerja output : 100 %
12) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daearah; jumlah anggaran : Rp 1.000.000,00 realisasi anggaran Rp 980.000,00; kinerja anggaran : 98 %; rencana output : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, 12 bulan ; realisasi output : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, 12 bulan; kinerja output : 100 %

13) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; jumlah anggaran : Rp 45.000.000,00 realisasi anggaran Rp 45.000.000,00; kinerja anggaran : 100 %; rencana output : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, 12 bulan ; realisasi output : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, 12 bulan; kinerja output : 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1) Pengadaan mebeleur, jumlah anggaran : Rp 14.000.000,00 realisasi anggaran Rp 12.734.000,00; kinerja anggaran : 90,96 %; rencana output : tersedianya kebutuhan mebeleur, 4 unit; realisasi output : tersedianya kebutuhan meja rapat, 4 unit; kinerja output : 100%
   2) Pengadaan sarana dan prasarana kantor, jumlah anggaran : Rp 13.000.000,00 realisasi anggaran Rp 13.000.000,00; kinerja anggaran : 100 %; rencana output : tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, 7 unit; realisasi output : tersedianya kebutuhan home use (soundsystem dan kipas angin), 7 unit; kinerja output : 100%
   3) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, jumlah anggaran : Rp 1.000,00 realisasi anggaran Rp 0,00; kinerja anggaran : 0 %; rencana output : terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, 1 unit; realisasi output : terlaksananya pemeliharaan rutin berkala rumah dinas, 0 unit; kinerja output : 0 %
   4) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, jumlah anggaran : Rp 1.000,00 realisasi anggaran Rp 0,00; kinerja anggaran : 0 %; rencana output : terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, 1 unit; realisasi output : terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, 0 unit; kinerja output : 0 %
   5) Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor jumlah anggaran : Rp 8.911.000,00 realisasi anggaran Rp 8.911.000,00; kinerja anggaran : 100 %; rencana output : terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, 1 unit; realisasi output : terlaksananya rehabilitasi sedang/berat berkala gedung kantor, 1 unit; kinerja output : 100 %
3. Program Pengembangan data/Informasi
   1) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, jumlah anggaran : Rp 5.000.000,00 realisasi anggaran Rp 4.840.000,00; kinerja anggaran : 96,80 %; rencana output : tersedianya dokumen perencanaan pembangunan, 6 dokumen; realisasi output : terlaksananya tersedianya dokumen perencanaan pembangunan, 6 dokumen; kinerja output : 100 %
4. Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah
   1) Penyusunan database dan profil desa/kecamatan, jumlah anggaran : Rp 7.779.000,00; realisasi anggaran Rp 7.679.000,00; kinerja anggaran : 98,71 %; rencana output :

tersedianya dokumen profile desa/kecamatan, 1 dokumen; realisasi output : tersedianya dokumen profile desa/kecamatan, 1 dokumen; kinerja output : 100 %

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
   1) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan jumlah anggaran : Rp 12.000,00 realisasi anggaran Rp 0,00; kinerja anggaran : 0 %; rencana output : terlatihnya anggota linmas, 48 orang; realisasi output : terlaksananya pelatihan linmas, 0 orang; kinerja output : 0 %
6. Program peningkatan keberdayaan masyaraat perdesaan
   1) Kegiatan Fasilitasi program pembangunan perdesaan jumlah anggaran : Rp 5.720.000,00 realisasi anggaran Rp 5.580.000,00; kinerja anggaran : 97,55 %; rencana output : terlaksananya fasilitasi program pembangunan perdesaan, 16 kegiatan (desa); realisasi output : terlaksananya fasilitasi program pembangunan perdesaan, 16 kegiatan; kinerja output : 100 %
7. Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa
   1) Fasilitasi TKP2KDes/Kel; jumlah anggaran : Rp 2.571.000,00 realisasi anggaran Rp 2.560.000,00; kinerja anggaran : 99,57 %; rencana output : Terlaksananya fasilitasi TKP2Kdes, 1 kegiatan; realisasi output : terlaksananya fasilitasi TKP2Kdes, 1 kegiatan; kinerja output : 100 %
8. Program peningkatan peran serta kepemudaan
   1) Pembinaan organisasi kepemudaan; jumlah anggaran : Rp 11.000,00 realisasi anggaran Rp 0,00; kinerja anggaran : 0 %; rencana output : terlaksananya pembinaan anggota karang taruna, 1 kegiatan; realisasi output : terlaksananya pembinaan anggota karang taruna, 0 kegiatan; kinerja output : 0 %
   2) Pembinaan sosial masyarakat; jumlah anggaran : Rp 11.000,00 realisasi anggaran Rp 0,00; kinerja anggaran : 0 %; rencana output : terlaksananya pembinaan social kemasyarakatan, 3 kegiatan; realisasi output : terlaksananya pembinaan social kemasyarakatan, 0 kegiatan; kinerja output : 0 %
9. Program pengembangan wawasan kebangsaan
   1) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa; jumlah anggaran : Rp 16.256.000,00 realisasi anggaran Rp 4.519.500,00; kinerja anggaran : 27,80 %; rencana output : terselenggaranya detik-detik Proklamasi dalam perayaan HUT RI, 1 kegiatan; realisasi output : terselenggaranya detik-detik Proklamasi dalam perayaan HUT RI ,1 kegiatan; kinerja output : 100 %
10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
    1) Fasilitasi APBDes; jumlah anggaran : Rp 19.532.000,00 realisasi anggaran Rp 19.487.000,00; kinerja anggaran :

99,77 %; rencana output : terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan APBDesa, 16 desa; realisasi output : terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan APBDesa, 16 desa; kinerja output : 100 %

11. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
    1) Pembinaan TP. PKK Kecamatan dan desa binaan; jumlah anggaran : Rp 25.494.000,00 realisasi anggaran Rp 23.558.500,00; kinerja anggaran : 92,41 %; rencana output : terlaksananya pembinaan TP PKK desa, 4 (empat) Pokja pada 16 desa; realisasi output : terlaksananya pembinaan TP PKK desa, 4 (empat) Pokja pada 16 desa; kinerja output : 100 %
12. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan KDH
    1) Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); jumlah anggaran : Rp 67.673.000,00 realisasi anggaran Rp 67.440.000,00; kinerja anggaran : 99,66 %; rencana output : terselenggaranya pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (Paten), 12 bulan; realisasi output : terselenggaranya pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (Paten), 12 bulan; kinerja output : 100 %
13. Program perencanaan pembangunan daerah
    1) Penyelenggaraan Musrenbangcam; jumlah anggaran : Rp 20.531.000,00 realisasi anggaran Rp 14.380.800,00; kinerja anggaran : 70,04 %; rencana output : terselenggaranya Musrenbang kecamatan dan Fasilitasi Musrenbangdes, 1 kegiatan; realisasi output : terselenggaranya Musrenbang kecamatan dan Fasilitasi Musrenbangdes, 1 Kegiatan; kinerja output : 100 %
    2) Kegiatan Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD); jumlah anggaran : Rp 5.531.000,00 realisasi anggaran Rp 5.531.000,00; kinerja anggaran : 100 %; rencana output : terselenggaranya rakor dan inventarisasi proyek desa, 1 kegiatan; realisasi output : terselenggaranya rakor dan inventarisasi proyek desa, 1 kegiatan; kinerja output : 100 %

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor dan pencapaian Renstra Kecamatan Sempor sampai dengan Tahun 2020 disajikan pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sempor s/d Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	
								Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01			Bidang Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	67	17	17	100	16	100	100
4	01	01	01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	09	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	72	48	12	12	100	12	72	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	
								Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	01	20	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72	48	12	12	100	12	72	100
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pertambahan sarana prasarana aparatur yang memadai	100	65	16	13	81	6	84	84
4	01	02	01	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	26	19	4	4	100	3	26	100
4	01	02	02	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	17	13	3	3	100	0	16	94

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	
								Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	02	21	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	6	3	1	0	0	0	3	50
4	01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6	3	1	0	0	1	4	67
4	01	02	42	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	6	3	1	1	100	0	4	67
4	01	15		Program pengembangan data/informasi	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen lainnya	100	67	17	17	100	16	100	100
4	01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen lainnya yang disusun	30	20	5	5	100	5	30	100
4	01	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase petugas Linmas terlatih dalam upaya peningkatan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	100	50	17	17	100	0	67	67
4	01	15	03	Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas terlatih	192	96	32	32	100	0	128	67
4	01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Prosentase dokumen database kecamatan yang tersusun	100	50	17	17	100	17	83	83
4	01	15	05	Kegiatan Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	6	3	1	1	100	1	5	83

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	
								Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase fasilitasi program pembangunan perdesaan	100	48	30	30	100	16	94	94
4	01	15	12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pemilihan kepala desa	14	0	14	14	100	0	14	100
4	01	15	13	Kegiatan Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Jumlah kegiatan fasilitasi program pembangunan perdesaan	96	48	16	16	100	16	80	83
4	01	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kel.	100	47	17	17	100	0	64	64
4	01	16	01	Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	96	48	16	16	100	0	64	67
4	01	16	10	Kegiatan Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan sosial masyarakat	24	8	4	4	100	0	12	50
4	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi kegiatan TKP2KDes	100	50	17	17	100	16	83	83
4	01	16	17	Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah keg. fasilitasi TKP2Kdes	6	3	1	1	100	1	5	83
4	01	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase tercapainya penyelenggaraan kegiatan2 HUT RI	100	50	17	17	100	16	83	83
4	01	17	03	Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah anggota paskibra terlatih dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT RI	300	150	50	50	100	50	250	83

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	
								Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4	01	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	100	50	17	17	100	16	83	83
4	01	17	10	Kegiatan Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi APBDesnya	96	48	16	16	100	16	80	83
4	01	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Prosentase TP. PKK desa yang terbina	100	50	17	17	100	16	83	83
4	01	19	02	Kegiatan Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK yang menjadi binaan	96	48	16	16	100	16	80	83
4	01	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	100	50	17	17	100	16	83	83
4	01	20	13	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN	Jumlah bulan penyelenggaraan PATEN	72	36	12	12	100	12	60	83
4	01	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase penyediaan dokumen operasional kebijakan perencanaan pemb. Daerah	100	50	17	17	100	16	83	83
4	01	21	14	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangcam	Jumlah proses perencanaan musrenbang yang dilakukan	6	3	1	1	100	1	5	83
4	01	21	15	Kegiatan Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Jumlah kegiatan Inventarisasi proyek masuk desa	6	3	1	1	100	1	5	83

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kecamatan Sempor termasuk perangkat daerah dengan tipe A artinya sebagai perangkat daerah dengan beban kerja besar. Sebagai perangkat daerah dengan tipe A Kecamatan Sempor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu kepada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan Sempor mempunyai tugas untuk: 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

1) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
2) pengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan di tingkat kecamatan;
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
4) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Kecamatan Sempor diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Tabel T-C.30 berikut ini menyajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sempor.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/ IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	-	-	81%	82%	83%	84%	89,24%	83,80% (s/d Tw.II)	89,74%	90,24%	

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sempor

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan

sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Kebumen, hal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 137/434 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

b. Permasalahan dan Hambatan

Pandemi Covid - 19 yang mulai mewabah dunia akhir Desember 2019 dan masuk ke Indonesia awal tahun 2020 dan sampai dengan bulan agutus 2021 ini belum berakhir menimbulkan dampak yang besar baik, ekonomi, social dan kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka menyelamatkan warga dari pandemi baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Kebijakan pemerintah pusat yang kemudian diteruskan ke pemerintah daerah sampai kecamatan dan desa. Di Kecamatan Sempor berbagai macam bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid 19, baik dari Kementerian Sosial, bantuan Propinsi, PKH, BPNT, JPS Kabupaten maupun bantuan bersumber dari dana desa. Bantuan tersebut diharapkan tepat sasaran dan mampu membantu masyarakat dalam menghadapai pandemi ini. Selain bantuan tersebut pemerintah menggalakan pemberian vaksin yang di mulai dari tenaga kesehatan, TNI/Polri, ASN serta masyarakat yang secara bertahap terus di dorong untuk mengikuti vaksin. Pemberian vaksin diharapkan mampu mengurangi penyebaran dan atau resiko penularan covid 19.

Pembentukan tim gugus tugas covid 19 tingkat kecamatan memberikan kontribusi dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran covid-19. Berbagai upaya dilakukan tim gugus tugas covid tingkat kecamatan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait covid 19, baik dengan sosialisasi ke desa-desa maupun operasi kepatuhan protokol kesehatan di tempat –tempat umum serta membantu tim gugus tugas kabupaten dalam rangka pelaksanaan rapid tes dan vaksinasi serta monitoring pelaksanaan isolasi mandiri di wilayah Kecamatan Sempor.

Pandemi ini menyebabkan Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban merasionalisasi anggaran baik pada tahun 2020 maupun rasionalisasi pada perencanaan anggaran tahun 2021. Bahkan perangkat daerah berkewajiban menggeser anggaran sebagian

upaya penanganan covid 19. Pada Kecamatan Sempor beberapa kegiatan dikurangi bahkan ditiadakan karena adanya pengurangan pagu indikatif sebagai akibat Pandemi covid 19 sehingga berpotensi mengganggu/mengurangi capaian target akhir renstra.

Selain permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Sempor, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi Pemerintah Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai sumber data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang;
2. Pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi menjadi tuntutan pembangunan modern dimana telah menjadi suatu kebutuhan. Hal ini akan meningkatkan pelayanan publik serta mereduksi paradigma *mainstream* masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah sangat birokratif dan berbelit;
3. Pada Tahun 2020 tercatat tingkat kemiskinan di Kecamatan Sempor masih sangat tinggi yaitu di kisaran 51,68 % dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen yang berada di angka 17,59 %. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih intensif terutama oleh pemerintah;
4. Desa-desa dalam Kecamatan Sempor termasuk ke dalam status Berkembang dari sisi Indeks Desa Membangun (IDM Tahun 2020). Status ini ditunjukan dengan dengan skor IDM sebesar 0,6597. Apabila dibandingkan dengan IDM Kabupaten Kebumen yang sebesar 0,6709 maka sebenarnya tidak terpaut jauh. Meskipun demikian tetap diperlukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan skor IDM agar menjadi Desa Maju.

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Sempor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

c. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Sempoor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengganggu kinerja pelayanan Kecamatan Sempor jika tidak mendapatkan penyelesaian dan diatasi dengan tepat yang pada akhirnya dapat mengurangi kontribusi Kecamatan Sempor dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Kebumen.

d. Peluang dan Tantangan

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght*, *Weakness, Opportunity and Threaths*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal
   a. Faktor Kekuatan *(Strenght)*
      1) Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai

semangat belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.

2) Tersedianya sarana/prasarana dan dan dukungan dana/pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah desa dan memperlancar kegiatan di kecamatan.
3) Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan;
4) Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan;
5) Adanya dukungan operasional Kecamatan Sempor yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen.

b. Faktor Kelemahan *(Weakness)*

1) Perkembangan tehnologi informasi yang tidak diimbangi kemampuan pegawai yang ada;
2) Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
3) Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
5) Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang *(Opportunity)*

1) Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan *(Visioner),* berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yanag berpartisipatif;
2) Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sempor;
3) Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang sudah mulai tertata.
4) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luanya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5) Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan;
6) Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap

kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sempor;

7) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
8) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

b. Faktor Ancaman *(Threat)*

1) Tuntutan masyarakat yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani;
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
3) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, misalnya bantuan yang kurang terkoordinasi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi aparat desa serta kemungkinan penerimaan ganda.

e. Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis yang akan dihadapi Kecamatan Sempor dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Camat pada Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut :

1 . Situasi dan kondisi yang dimungkinkan belum stabil dikarenakan pandemi covid 19, yang berdampak pada kondisi kesehatan, ekonomi dan sosial;
2. Belum optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;
3. Tingkat kemiskinan yang mencapai 51,68 % termasuk kategori sangat tinggi memerlukan upaya ekstra Kecamatan Sempor dengan melibatkan semua *stakeholders*;
4. Angka ODF (*Open Defecation Free*) di Kecamatan Sempor sudah 100 % (data Puskesmas Sempor I sampai dengan Maret 2021). Tercatat semua penduduk memiliki akses ke JSP (Jamban Sehat Permanen) dan JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen);
5. Desa-desa dalam Kecamatan Sempor berstatus sebagai Desa Berkembang berdasarkan IDM yang perlu ditingkatkan menjadi berstatus Desa Maju. Peningkatan status tersebut dapat diupayakan mengingat potensi ekonomi yang ada cukup mendukung diantaranya:
   a) Sector pariwisata
      - Obyek wisata alam Wadasmalang dan Watubarut di Desa Semali
      - Obyek wisata alam Tandon di desa Tunjungseto
      - Obyek wisata alam Jegir dan wisata religi Masjid Soko

Tunggal dan Makam Adipati Raden Mangkuprojo di Desa Pekuncen
- Obyek wisata alam Watujali di Desa Somagede

b) Sector perdagangan dan home industry
- Desa Jatinegara mengelola usaha air kemasan isi ulang (BUMDes)
- Desa Sempor mengelola jaringan internet berbayar (BUMDes)
- Desa Donorojo mengelola Toko Sembako (BUMDes)
- Desa Bejiruyung mengelola Apotik dan Toko Sembako (BUMDes)
- Desa Kedungjati mengelola Toko ATK dan fotocopy (BUMDes)
- Desa Selokerto mengelola Toko Sembako (BUMDes)
- Desa Sidoharum mengelola kios-kios pasar desa (BUMDes)
- Sentra gula semut di Desa Sempor dan Sampang (kelompok masyarakat)

Isu – isu dan permasalahan tersebut di atas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sempor sebagai berikut :

1. Perlunya mengadakan kebijakan pemerintah yang transparan, terkoordinasi dan efektif dalam penanganan covid 19;
2. Perlunya Optimalisasi fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
3. Perlunya memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif);
4. Perlunya meningkatkan integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
5. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia di Kecamatan agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja;
6. Perlunya peningkatan kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan desa;
7. Perlunya membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat;
8. Pentingnya Penyerapan aspirasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kecamatan Sempor dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sempor menuju *good govenance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

D. *Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah*

Rancangan awal RKPD Kecamatan Sempor Tahun 2022 terdiri atas 4 program dengan 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan serta pagu indikatif Rp. 2.044.824.000,00 (Dua milyar empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Dengan adanya rasionalisasi terhadap anggaran Tahun 2022 dan analisis kebutuhan sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun serta berkurangnya dana transfer pemerintah pusat maka terjadi beberapa pengurangan bahkan penghapusan kegiatan dan penambahan satu sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD. Berdasarkan hal – hal tersebut Kecamatan Sempor pada tahun 2022 menjalankan 4 program 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 2.044.824.000,00 (Dua milyar empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Reviev terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 tersaji dalam tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kecamatan Sempor

Nama SKPD : Kecamatan Sempor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	KECAMATAN				**2,044,824**	**KECAMATAN**				**2,044,824**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**1,818,824**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**1,818,824**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**11 dokumen**	**8,600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**11 dokumen**	**8,600**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sempor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)	5 dokumen	6,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sempor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026	5 dokumen	6,600	
2	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kec. Sempor	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP,SPIP, LPPD)	6 dokumen	2,000	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kec. Sempor	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP,SPIP, LPPD)	6 dokumen	2,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**1,668,686**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**1,668,686**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sempor	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	16 orang	1,649,686	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sempor	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	16 orang	1,649,686	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sempor	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)	4 dokumen	17,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sempor	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)	4 dokumen	17,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**30,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**30,000**	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sempor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	4 jenis	2,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sempor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	4 jenis	2,000	
6	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	13,000	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	13,000	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sempor	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	2,900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sempor	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	2,900	
8	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sempor	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	1,600	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sempor	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	1,600	
9	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bulan	7,000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bulan	7,000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Kec. Sempor	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	4 orang/kali	1,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Kec. Sempor	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	4 orang/kali	1,500	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Sempor	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	12 bulan	2.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Sempor	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	12 bulan	2.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**49,650**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**49,650**	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat	12 bulan	1,650	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat	12 bulan	1,650	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	31,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	31,000	
14	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12 bulan	17,000	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Kec. Sempor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12 bulan	17,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**63,888**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**63,888**	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sempor	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	10 unit	34,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sempor	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	10 unit	34,000	
16	Pemeliharaan Mebel	Kec. Sempor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	20 unit	2,000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Sempor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	20 unit	2,000	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sempor	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7 unit	3,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sempor	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7 unit	3,000	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sempor	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	2 unit	19,888	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sempor	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	2 unit	19,888	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sempor	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan banguinan lainnya	5 unit	5,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sempor	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan banguinan lainnya	5 unit	5,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**58,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**58,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**100 %**	**58,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**100 %**	**58,000**	
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	Kec. Sempor	Jumlah dokumen Perekaman (KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran)	5 dokumen	58,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	Kec. Sempor	Jumlah dokumen Perekaman (KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran)	5 dokumen	58,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase terselenggaraan ya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen**	**100 %**	**24,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen**	**100 %**	**24,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kab. Kebumen)**	**2 kegiatan**	**24,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jml kegiatan dlm rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)**	**2 kegiatan**	**24,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sempor	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	2 kegiatan	24,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Kec. Sempor	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	2 kegiatan	24,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi**	**100 %**	**144,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi**	**100 %**	**144,000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi**	**100 %**	**144,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi**	**100 %**	**144,000**	
22	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sempor	Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	16 desa	23,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sempor	Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	16 desa	23,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sempor	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen	17,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sempor	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen	17,000	
24	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sempor	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	11,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sempor	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	11,000	
25	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sempor	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraa n musrenbangdes dan Musrenbangcam	2 kegiatan	21,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sempor	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam	2 kegiatan	21,000	
26	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan MasyarakatDesa	Kec. Sempor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa)	5 kegiatan	65,000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan MasyarakatDesa	Kec. Sempor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa)	5 kegiatan	65,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Kec. Sempor	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes)	16 kali	7,000	Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Kec. Sempor	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes)	16 kali	7,000	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Sempor diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2020. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan mesyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sempor. Tabel T-C.32 berikut ini menyajikan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sempor:

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kecamatan Sempor

(Usulan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 - Usulan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022)

No	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Desa Kenteng, Semali dan Kedungwringin	1. Ubi kayu : Bibit, saprodi (22650000+7350000), pelatihan budidaya (Kenteng, Semali, Kedungwringin) 2. Kelapa GEK : bibit, saprodi, pelatihan budidaya 3. Aren : bibit,saprodi, pelatihan budidaya	98.750.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Desa Kenteng, Semali dan Kedungwringin	1. Ubi kayu : Pelatihan olahan oyek dan alat 2. Kelapa GEK : Pelatihan olahan gula semut dan alat 3. Aren : Pelatihan olahan gula kristal dan alat (Kenteng, Semali, Kedungwringin) 4. Sempor Expo dan UMKM	462.918.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Dan UMKM

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2022 – 2026 adalah : *""*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*"*.

- Kebumen Semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjungjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisis isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Sempor adalah : *"Belum optimalnya implementasi Clean and Good Governance"*. Semua program kegiatan di Kecamatan Sempor dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat .

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang *responsif* serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Sempor adalah Misi 1 (satu), yaitu Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang *responsif* serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sempor

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

pada Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021 - 2026, maka Tujuan dari Kecamatan Sempor adalah “Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik”. Sementara sasarannya terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan indikator sasaran sejumlah 2 (dua). Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Sempor tahun 2022 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sempor

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Clean and Good Governance*)	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
		Meningkatnya Kulitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	89,24	83,80 (s/d Tw. II)	89,74	90,24	90,74	91,24	91,74	91,74

C. Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sempor secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2) Pencapaian SDGs

Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG,s) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 dengan Target Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka (*Open Defecation*).

Kontribusi Kecamatan Sempor dalam mendukung pencapaian target tersebut diatas terlihat dari Angka ODF (*Open Defecation Free*) di Kecamatan Sempor sudah 100 % (data Puskesmas Sempor I sampai dengan Maret 2021). Tercatat semua penduduk memiliki akses ke JSP (Jamban Sehat Permanen) dan JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen)

3) Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Secara kuantitatif tingkat kemiskinan di Kecamatan Sempor sangat tinggi yaitu 51,68 %. Hal ini memerlukan upaya pengentasan kemiskinan melalui kewenangan dan tupoksi yang dimiliki oleh Kecamatan Sempor.

4) P endayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi sector pariwisata yang terdapat di Kecamatan Sempor yang sudah lama ada adalah Obyek Wisata Waduk Sempor. Sedangkan potensi lain yang sedang digali dan dikembangkan adalah obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat diantaranya :

1. Obyek wisata alam Wadasmalang dan Watubarut di Desa Semali
2. Obyek wisata alam Tandon di desa Tunjungseto
3. Obyek wisata alam Jegir dan wisata religi Masjid Soko Tunggal dan Makam Adipati Raden Mangkuprojo di Desa Pekuncen

4. Obyek wisata alam Watujali di Desa Somagede

Sektor perdagangan dan home industry juga sedang dikembangkan baik oleh Pemerintah Desa maupun kelompok masyarakat diantaranya :

1. Desa Jatinegara mengelola usaha air kemasan isi ulang (BUMDes)
2. Desa Sempor mengelola jaringan internet berbayar (BUMDes)
3. Desa Donorojo mengelola Toko Sembako (BUMDes)
5. Desa Bejiruyung mengelola Apotik dan Toko Sembako (BUMDes)
6. Desa Kedungjati mengelola Toko ATK dan fotocopy (BUMDes)
7. Desa Selokerto mengelola Toko Sembako (BUMDes)
8. Desa Sidoharum mengelola kios-kios pasar desa (BUMDes)

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sempor Tahun 2022 adalah 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan didalamnya. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sempor sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sempor, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Sempor dan Kantor Kecamatan Sempor sendiri. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.044.824.000 (dua milyar empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

c. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sempor mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Rencana kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 terdiri dari 4 program meliputi 8 kegiatan mencakup 27 sub kegiatan. Hal ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja 2022

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.600.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.649.686.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.900.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000
			Penyediaan Bahan/Material	7.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	34.000.000
			Pemeliharaan Mebel	2.000.000
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.888.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	58.000.000
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.000.000
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	23.000.000
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	17.000.000
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	65.000.000
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000
Jumlah				**2.044.824.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Kebumen telah memasuki tahapan keempat pembangunan lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan tahap kedua pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk mewujudkan visi pembangunan pada tahapan ini, RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2022 berpedoman kepada visi, misi, tahapan dan skala prioritas utama pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, serta memperhatikan permasalah dan isu strategis pembangunan daerah dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif dalam rangka mendukung tercapainya arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 antara lain :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui *e-Government* dan peningkatan kapabilitas aparatur, melalui upaya :
    2) Penyelenggaraan sistem jaringan pemerintah daerah;
    3) Pengawasan e-government pemerintah daerah;
    4) Fasilitas pelayanan public dan tata laksana;
    5) Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
2. Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang *adaptif pandemic* dilakukan melalui upaya :
    1) Pengelolaan pendidikan;
    2) Pengembangan kurikulum;
    3) Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat;
    4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, dilakukan melalui upaya –upaya :
    1) Penyedian dan pengembangan sarana dan prasaran pertanian;
    2) Penyuluhan pertanian;
    3) Pengelolaan perikanan tangkap;
    4) Pengelolaan perikanan budidaya;
    5) Pemberdayan industry dan peran serta masyarakat.
4. Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah, dilakukan melalui upaya:
    1) Penyelenggaraan jalan kabupaten;
    2) Pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
    3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
    4) Pengembangan system penyediaan air minum.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana dilakukan melalui upaya:
    1) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;

2) Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten;
3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Program Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 disajikan tabel berikut :

Kode Program	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
7.01.1.20.27.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.000.000	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000	
X.X.X.1.20.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.000.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
		Penyediaan Bahan/Material	7.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.900.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.500.000	

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sempor Tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Sempor memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Sempor maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sempor dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sempor di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Bahwa dengan adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar baik secara ekonomi maupun sosial. Berbagai upaya penangan covid 19 dilakukan pemerintah dengan memberikan berbagai bantuan BPNT, PKH, Jaring Pengaman Sosial Kabupaten, bantuan propinsi serta bantuan yang dianggarkan dari Dana Desa.. Berbagai bantuan rawan terjadi penerimanaan ganda, menyebabkan desa berkali – kali melaksanakan musdes untuk menentukan penerima bantuan supaya tepat sasaran.

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Sempor melalui sektor pariwisata beberapa desa di Kecamatan Sempor berupaya mengembangkan obyek wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada setidaknya mampu dikenal dan dapat menjadi tujuan wisata lokal masyarakat Kebumen sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat. Beberapa Obyek wisata yang sedang dirintis pengembangannya melalui dana desa yaitu : wisata Wadasmalang dan Jegir. Sedangkan yang melalui swadaya masyarakat adalah Watujali dan Tandon. Pada sector perdagangan dan home industry usaha yang sedang dikembangkan berupa air kemasan isi ulang, Pertashop, Toko Sembako, Toko ATK dan fotocopy, apotik dan jaringan internet berbayar.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sempor Tahun 2022 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Sempor serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1) Kecamatan Sempor berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sempor Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
2) Kecamatan Sempor berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sempor Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Sempor Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sempor Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Merespon isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Kecamatan Sempor pada Tahun 2022 langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak kepada kondisi kesehatan, ekonomi dan social masyarakat. Dampaknya ini masih akan terasa di Tahun 2022. Dengan dukungan operasional yang dimiliki oleh Kecamatan Sempor akan berupaya untuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga kesehatan terutama terkait penerapan protocol kesehatan. Target kelompok masyarakat yang dituju secara spesifik adalah siswa-siswa SD dan SMP di Kecamatan Sempor yaitu dengan pembinaan UKS yang terdapat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2) Perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan belum optimal dimana masih terdapat data yang tumpang tindih yang berpotensi adanya penerima bantuan ganda. Untuk menghindari data yang tumpang tindihmaka melalui Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya akan dilakukan fasilitasi entry Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) pada masing – masing desa dalam wilayah Kecamatan Sempor;
3) Dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi yaitu di angka 51,68 %, Kecamatan Sempor dengan dukungan operasional yang ada akan berupaya semaksimal mungkin menekan/menurunkan angka kemiskinan tersebut. Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan pembinaan TP. PKK Desa dan Karang Taruna Desa. Materi pembinaan yang diberikan seputar kewirausahaan.
4) Tercatat ODF (*Open Defecation Free*) di Kecamatan Sempor sudah 100 %. Namun demikian tetap diperlukan upaya edukasi agar masyarakat semakin meningkat kesadarannya untuk memiliki JSP (Jamban Sehat Permanen) sehingga JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen) yang menandakan kulitas sanitasi semakin baik. Saluran edukasi melalui pembinaan TP. PKK Desa dalam Sub

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5) Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sempor dengan nilai IDM sebesar 0,6597 masuk dalam kategori Desa Berkembang. Dengan potensi ekonomi desa yang ada akan diupayakan untuk ditingkatkan nilai IDM-nya untuk menuju menjadi Desa Maju. Melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa, Kecamatan Sempor akan berupaya untuk memaksimalkan fungsi fasilitasi yang dimiliki untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa akan mendukung upaya peningkatan pembangunan di desa dengan memanfaatkan potensi yang ada. Penggunaan Dana Desa untuk mengungkit potensi ekonomi di sector pariwisata seperti obyek wisata Wadasmalang dan Watubarut di Desa Semali, Tandon di Desa Tunjungseto, Jegir di Desa Pekuncen dan Watujali di Desa Somagede akan terus didukung. Demikian juga terhadap potensi ekonomi di sector perdagangan dan home industry gula semut dan gula Kristal di Desa Sempor dan Sampang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sempor ini merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2022. Recana Kerja Kecamatan Sempor juga memberikan umpan balik *(feed back)* dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Sempor ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 10 September 2021

CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. DRAJAT TRIWIBOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650531 199303 1 003

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA

NAMA	TANDA TANGAN
Tri Anggorowati	
Umi Juliastuti	